

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM
(DAU), DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah Dan DIY)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ERWIN DWI SAPUTRO

B 200 110 206

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah Dan DIY)**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

ERWIN DWI SAPUTRO
B 200 100 206

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah Dan DIY)**




Yang ditulis oleh:

ERWIN DWI SAPUTRO
B 200 110 206

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Sabtu, 22 Oktober 2016
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Noer Sasongko, M.Si., CA., Ak.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis / diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu didalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelas terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2016

Yang Menyatakan



Erwin Dwi Saputro

B. 200110206

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah Dan DIY)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal.

Metode penelitian menggunakan metode dokumentasi. Sampel dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian mengambil populasi Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah dan DIY Tahun 2012 hingga 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah dan DIY.: 1) Uji Regresi Linear Berganda, 2) Uji t, 3) Uji F (Uji Ketepatan Model) dan 4) Koefisien Determinasi (R²)

Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut: 1) PAD mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H1 diterima, 2) DAU mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan dengan hasil DAU nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima. 3) Wilayah tidak mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan dengan hasil nilai sig. sebesar 0,063 lebih besar dari 5%, sehingga H3 ditolak.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Luas Wilayah dan Alokasi Belanja Modal.

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the original income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Area Regional Allocation Of Capital Expenditure.

The research method using the method of documentation. Samples was done by collecting, recording and calculating data relating to research taking population Regency / City Se Central Java and Yogyakarta in 2012 to 2014. The sampling technique using census method is a method by taking samples of all districts and cities in Central Java and DIY .: 1) Test Linear Regression, 2) Test t, 3) F Test (Test Accuracy Model) and 4) The coefficient of determination (R²)

The results of the analysis as follows: 1) PAD have an influence on the Capital Expenditure Allocation, evidenced sig. 0,000 less than 5%, so that H1 is accepted, 2) DAU has an influence on the Capital Expenditure Allocation, evidenced by the results DAU sig. 0,000 less than 5%, so that H2 is accepted. 3) The area does not have any impact on the Capital Expenditure Allocation, evidenced by the results sig. amounted to 0.063 greater than 5%, so that the H3 is rejected.

Keywords: revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Broad Areas and Capital Expenditure Allocation.

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik Pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun 2004). Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan penelitian Kuantitatif dan data digunakan adalah data sekunder. Data digunakan adalah data sekunder meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal pada instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2012 s/d 2014 ke situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan www.djpk.go.id dan [http:// www.kemendagri](http://www.kemendagri).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah dan DIY dan akan mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria : menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Diljen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 hingga 2014, dan mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan Alokasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten / kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa regresi berganda dengan pengujian hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	397453,833			
PAD	-0,654	-4,876	0,000	H ₁ diterima
DAU	1,116	9,960	0,000	H ₂ diterima
Wilayah	-81,612	1,878	0,063	H ₃ ditolak

Sumber : Data Sekunder, 2016

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta 397453,833 menunjukkan bahwa jika variabel PAD, DAU dan Wilayah diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka besarnya Alokasi Belanja Modal akan meningkat.
- Koefisien regresi variabel PAD bernilai positif sebesar - 0,654 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan PAD sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan peningkatan sebesar 0,654. Sebaliknya setiap ada penurunan PAD sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,654.
- Koefisien regresi variabel DAU bernilai negatif sebesar 1,116 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan DAU sebesar 1% maka Alokasi Belanja

Modal akan meningkat sebesar 1,116. Sebaliknya setiap ada penurunan DAU sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan menurun sebesar 1,116.

- Koefisien regresi Wilayah yang bernilai negatif sebesar 81,612 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Wilayah sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 81,612. Sebaliknya setiap ada penurunan Wilayah sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan menurun sebesar 81,612.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, besar nilai koefisien regresi untuk variabel PAD adalah $-0,654$ maka H_1 diterima, yang berarti bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.2.2 Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000$, besar nilai koefisien regresi untuk variabel DAU adalah $1,116$, maka H_2 diterima, yang berarti DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.2.3 Pengaruh Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar $0,063 > 0,05$, besar nilai koefisien regresi untuk variabel Pertumbuhan Penjualan adalah $81,612$ maka H_3 ditolak, yang berarti Wilayah tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: PAD mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan perhitungan t_{hitung} variabel PAD sebesar $-4,876$ lebih besar dari t_{tabel} sebesar $-1,981$, dan nilai sig. sebesar $0,000$ lebih kecil dari 5% , sehingga H_1 diterima. DAU mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan dengan hasil DAU sebesar $9,960$ lebih besar dari t_{tabel} sebesar $1,981$, dan nilai sig. sebesar $0,000$

lebih kecil dari 5%, sehingga H_2 diterima. Wilayah tidak mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, dibuktikan dengan hasil, perhitungan t_{hitung} sebesar 1,878 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,981, dan nilai sig. sebesar 0,063 lebih besar dari 5%, sehingga H_3 ditolak.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, sehingga tidak hanya instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota saja tetapi instansi pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain karena dimungkinkan ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan sehingga hasil penelitian akan lebih baik dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2009, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiharsono S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Edy Meianto, Betri, Cherrya Dhia Wenny, 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*, Jurnal, Palembang: STIE Multi Data Palembang.
- Hadi, Sutrisno, 2008, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- M. Munandar , 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

- Maryadi, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*, Jurnal, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Volume 8 No.2.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). FakultasEkonomi UNDIP: Semarang.
- Setyowati, Lilis, Yohana Kus Suparwati. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Prestasi Vol. 9 No 1 - Juni 2012. ISSN 1411 -1497.
- Siswanto, Dodik & Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.